

SANKSI SOSIAL BELUM BERIKAN EFEK JERA

Sat Pol PP Kaji Percepatan Penerapan Denda

YOGYA (KR) - Sat Pol PP Kota Yogya kini tengah mengkaji untuk mempercepat proses sanksi berupa denda bagi pelanggaran protokol kesehatan. Terutama masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker di kawasan wajib masker.

Komandan Sat Pol PP Kota Yogya Agus Winarto, menyebut penegakan Perwal 51/2020 secara preventif yang dimulai sejak Sabtu (19/9) lalu selalu menemukan jumlah pelanggaran di atas 50 orang dalam semalam. Padahal patroli hanya dilakukan pada titik tertentu di kawasan Tugu, Malioboro hingga Kraton atau Gumaton. “Sepanjang Gumaton merupakan kawasan wajib bermasker. Selama empat hari total yang melanggar masker di atas 300 orang,” katanya, Rabu (23/9).

Tindakan preventif yang diberikan pada tahap awal sebatas peringatan

dan sanksi sosial. Sementara penerapan denda sebesar Rp 100.000 bagi yang tidak bermasker rencananya baru akan diterapkan pada Oktober mendatang. Akan tetapi, seiring tingginya angka pelanggaran maka penerapan denda dimungkinkan lebih cepat.

Agus mengaku, sebetulnya denda bukan merupakan tujuan ketika warga sudah cukup diberikan sanksi sosial. Namun jika pemberian sanksi sosial belum memberikan efek jera maka sanksi terakhir berupa denda terpaksa harus dilakukan.

“Sebenarnya sudah ada tiga orang

yang dikenai denda. Itu pun karena permintaan mereka sendiri karena tidak bersedia menjalani sanksi sosial berupa menyapu jalan,” katanya.

Kesiapan menjatuhkan denda bagi yang tidak menggunakan masker sebetulnya juga sudah terfasilitasi. Di antaranya berupa blangko, dua orang saksi serta meja dan kursi untuk pemberkasan.

Sementara mayoritas pelanggaran protokol atau yang kedapatan tidak menggunakan masker merupakan anak-anak muda. Baik yang tengah nongkrong bersama rekan-rekannya di warung maupun ketika sedang berkendara. “Banyak yang sebenarnya membawa masker namun tidak dipakai. Ada-ada saja alasannya, tapi aturan harus kami tegakkan,” tandasnya. **(Dhi)-f**

Kemenag RI Puji Kankemenag Kota Yogya

YOGYA (KR) - Tim Penilai Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan pujian secara terbuka kepada Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Yogyakarta. Hal itu mengemuka setelah tim mencermati dokumen formulir yang telah diisi dan disiapkan Kankemenag Kota Yogyakarta.

“Tidak salah Kemenag RI memilih Kankemenag Kota Yogyakarta sebagai fokus penilaian. Data yang diisikan lengkap dan kami mendapat sambutan luar biasa,” tandas perwakilan tim KemenPAN-RB Junaidi Sinaga, Rabu (23/9). Tim secara khusus berkunjung ke Kankemenag Kota Yogyakarta, Senin (21/9).

Dijelaskan Junaidi, melihat dokumen dan seluruh isian formulir juga sarana-prasarana fisik kantor termasuk Sistem Informasi Pelayanan Publik, pihaknya berharap Kankemenag Kota Yogyakarta akan menjadi role model bagi Kankemenag lain. “KemenPAN RB meminta satu unit terbaik di tiap Kementerian/Lembaga yang nanti akan menjadi role model. Kemenag RI telah memilih Kankemenag Kota Yogyakarta. Kami yakin pelayanan publiknya pasti baik,” beber pria yang akrab disapa Juna tersebut.

Selain itu pihaknya juga mengapresiasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan tiap bulan. KemenPAN RB juga menilai reward bulanan kepada pegawai berprestasi yang dilakukan Kankemenag Kota Yogyakarta merupakan inisiatif yang bagus.

Juna juga berpesan agar feedback masukan dari masyarakat bisa diolah. “Bisa dijadikan frequently asked question (FAQ) atau daftar pertanyaan yang sering diajukan, agar ditampilkan di website dan medsos. Sebab yang kami lakukan bukan mengaudit, tapi pembinaan berkelanjutan,” imbuh Juna.

Terpisah Kabag Tata Usaha Kemenag DIY Wahib Jamil menandaskan, semangat yang dibangun Kankemenag Kota Yogyakarta merupakan bagian ‘Dari Jogja untuk Indonesia’. “Sehingga tidak hanya berjuang untuk lingkup kecil, namun memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia,” katanya. **(Feb)-f**

PEMKOT SEBAR 1.280 WASTAFEL KE SEKOLAH

Covid-19 Tak Hentikan Belajar



KR-Primaswolo S

Haryadi didampingi Budi Asrori menerima SK dan laporan dari Kepala SMPN 5 Yogyakarta.

YOGYA (KR) - Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menegaskan tetap berlakunya pembelajaran daring (jarak jauh), untuk menghindari penyebaran Covid-19 di sekolah. Penegasan tersebut disampaikan di tengah adanya desakan sebagian pihak yang ingin diberlakukannya pembelajaran tatap muka di sekolah.

Demikian disampaikan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat menerima silaturahmi Kepala SMPN 5 Yogyakarta, Dra Nuryani Agustina MPd dan Ketua Komite Sekolah Supriyono SH SPd MM CM. Walikota didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori SE MSi.

Silaturahmi tersebut selain melaporkan kepengurusan baru Komite Sekolah. Sedangkan Haryadi yang kedua putrinya alumni SMPN 5 Yogyakarta diadaiat menjadi penasehat.

“Dari SD dan SMP yang menjadi kewenangan kami, pembelajaran masih tetap dengan daring. Meski terjadi pandemi Covid-19 berkepanjangan, tidak bisa kemudian menghentikan pro-

ses belajar peserta didik,” ujar Walikota.

Menurut Walikota, para orang tua harus memahami risiko besar yang akan dihadapi anak jika masuk sekolah. Dari aspek sosial, mereka senang karena bisa bertemu. Namun dari kemungkinan terjadinya kerumunan, akan sangat sulit

mengontrolnya.

Jangan sampai sekolah menjadi faktor munculnya kluster keluarga, karena Covid-19 dibawa dari sekolah ke keluarga, kemudian menyebar ke anggota keluarga lainnya.

Covid, tidak menghalangi belajar. Guru yang mengajar dan anak berpartisipasi ikut. Daring, anak-anak punya kewajiban, guru menyampaikan materi. Yang berbeda hanya kegiatan sosialnya.

Ke depan, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mempersiapkan protap jika sudah diperolehkan pembelajaran tatap muka, dengan sejumlah pembatasan. Saat ini, pihaknya menyebar 1.280 wastafel ke sekolah, sebagai salah satu upaya menegakkan protokol kesehatan. **(Jon)-f**

Musda ASITA Akan Pilih Ketua



KR-FranzBoedi Soekamanto

Pengurus sekaligus Panitia Musda ASITA DIY foto bersama jajaran Direksi.

YOGYA (KR) - Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) DIY akan melaksanakan musyawarah daerah (Musda), 1 Oktober 2020 untuk memilih ketua dan pengurus baru. Sedangkan pada Kamis (24/9) pengurus melaksanakan Pramusda dengan beberapa agenda secara tertutup dengan memperhatikan protokol kesehatan.

“Agenda Pramusda di antaranya Laporan Pertanggungjawaban (LPj) kepengurusan termasuk penggunaan anggaran operasional, pedoman tata tertib musda dan verifikasi calon. Sampai saat ini sudah ada dua nama yang akan dipilih menjadi ketua dalam musda, yaitu Heri Setyawan dan Joko Kuntoro,” kata Ketua Panitia Musda ASITA DIY Jajang Sukendar didampingi panitia lainnya Moko D Soediro, Sri Sadono dan H Rudyanto. Hal itu disampaikan saat bersilaturahmi dengan Direktur Pemasaran KR Fajar Kusumawardhani SE, Direktur Keuangan KR Imam Satriyadi SH dan Direktur Umum Yuriya Gun Nugroho Samawi

SE MM Msc dan Pemred KR Drs Octo Lampito MPd, Rabu (23/9).

Jajang mengakui ketersediaan dua bakal calon patut dihargai karena masih mau memikirkan organisasi di tengah kesulitan selama pandemi Covid-19. Apalagi biro perjalanan wisata berhenti total sejak pandemi melanda. Bahkan, saat ini sudah ada tiga anggota yang mengundurkan diri dari ASITA DIY.

“Saat ini ada 164 anggota ASITA DIY dan semuanya berhenti operasi sejak Maret 2020. Beruntung, ada banyak stimulus dan bantuan yang diberikan kepada seluruh stakeholders pariwisata di DIY, termasuk ASITA. Kami berharap pandemi segera berakhir dan ketua mendatang bisa menggerakkan dan membawa ASITA menjadi lebih baik lagi,” kata Jajang.

Jajang menambahkan selama pandemi telah menerima bantuan sembako, sejumlah pelatihan hingga rencana program bantuan subsidi paket wisata dari pemerintah bagi seluruh stakeholders pariwisata di DIY. **(Tom)-f**

CATUT NAMA WALIKOTA YOGYA

Waspadai Penipuan Bermodus Bantuan

YOGYA (KR) - Masyarakat diimbau selalu waspada terkait berbagai modus penipuan. Salah satu modus terbaru ialah dengan dalih pemberian bantuan ke pondok pesantren dengan mencatat nama Walikota Yogya Haryadi Suyuti.

Dalam aksinya, oknum tersebut mengirimkan pesan ke pengelola pondok pesantren dan mengaku sebagai walikota. Dalam pesannya, akan ada bantuan uang yang digulirkan ke pondok pesantren dengan nominal bervariasi. Akan tetapi, sebagian dari nilai bantuan diminta untuk ditransfer ke orang tertentu. “Misal akan ada bantuan senilai Rp 15 juta, nah yang Rp 5 juta disuruh transfer dulu ke orang lain sambil menyebut nama ustadz,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogya Tri Hastono, Rabu (23/9).

Pihaknya saat ini masih menelusuri apakah ada pondok pesantren yang terpedaya dengan ulah oknum penipu. Meski demikian, upaya hukum juga tengah dikaji karena bisa meresahkan masyarakat. Dari penelusuran awal, terdapat dua pondok pesantren yang mendapat pesan serupa. Beruntung, pihak pengelola langsung melakukan kroscek sehingga bisa di

antisipasi. Namun belum dipastikan apakah ada pengelola lain yang telah terpedaya.

Sementara Haryadi mengaku cukup kaget setelah mendapat laporan dari rekannya jika ada sejumlah pengelola pondok pesantren yang mendapat pesan tersebut. Saat itu dirinya pun langsung meminta agar tidak mudah percaya dan selalu mengedepankan verifikasi. “

Dalam situasi seperti ini, jangan mudah percaya terhadap siapa pun yang menjanjikan bantuan. Apalagi ada ‘embel-embel’ nya. Saya sudah minta agar ini ditelusuri, jangan sampai ada yang menjadi korban,” tandasnya.

Menurut Haryadi, bantuan yang digulirkan pemerintah dan bersifat dana hibah wajib melalui prosedur. Diawali dengan pengajuan proposal, verifikasi serta pemberitahuan secara resmi. Bagi yang lolos sebagai penerima pun ada nota perjanjian sebelum disalurkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan.

Oleh karena itu, Haryadi mengajak masyarakat selalu melakukan klarifikasi dan tidak mudah percaya. Pemkot Yogya melalui aparat di wilayah selalu terbuka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. **(Dhi)-f**



DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

TINGKATKAN DISIPLIN WARGA

Patuhi Protokol Kesehatan, Cegah Penyebaran Covid-19

YOGYA (KR) - Merebaknya kasus Covid-19 dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG) semakin menyulitkan untuk mengetahui sumber penularan. Hal ini karena tidak menutup kemungkinan orang yang dari sisi fisik terlihat sehat namun ternyata membawa virus Korona. Oleh karena itu untuk mencegah penyebaran Covid-19 maka protokol kesehatan harus benar-benar dipatuhi.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Yogya Agusnur SH SIP, menjelaskan edukasi untuk penerapan protokol kesehatan di masyarakat sebenarnya sudah cukup gencar dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi upaya itu harus terus dilakukan secara terus-menerus dan konsisten supaya menjadi budaya baru dalam kehidupan sehari-hari. “Dengan kondisi sekarang yang banyak OTG, maka tidak ada kata lain untuk melindungi diri selain mematuhi protokol kesehatan,” tandasnya.

Protokol kesehatan yang paling utama, imbuh Agusnur, ialah menyangkut tiga hal yakni selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun serta menjaga jarak fisik dengan orang lain. Ketiga hal itu sudah harus menjadi kebiasaan di tengah ma-



KR-Ardhi Wahdan

Agusnur SH SIP

syarakat, baik saat tengah beraktivitas di luar rumah maupun ketika berada di lingkungan keluarga.

Dari sisi regulasi, Agusnur, mengaku Pemkot Yogya sudah memiliki Perwal 51/2020 terkait pedoman penyelenggaraan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. Di dalamnya mengatur sanksi bagi siapa pun yang melanggar protokol kesehatan. Baik bagi individu yang tidak menggunakan masker di tempat umum maupun pelaku usaha yang mengabaikan protokol. “Sanksi itu bukan tujuan akhir,

tetapi bagaimana masyarakat bisa memahami dan sadar terhadap kesehatannya sehingga dengan sendirinya mau menerapkan protokol. Tetapi jika sudah kesulitan dalam mengingatkan masyarakat maka tidak ada pilihan lain kecuali sanksi,” paparnya.

Sementara untuk meningkatkan disiplin masyarakat, Agusnur mengusulkan agar para tokoh, komunitas serta elemen lain turut dilibatkan. Mereka yang selama ini berkuat di masyarakat perlu digandeng dan dijadikan agen dalam adaptasi kebiasaan baru. Sehingga dalam keseharian di masyarakat penerapan protokolnya bisa lebih tertata meski sudah ada satgas di tingkat wilayah.

Di samping itu, upaya untuk meningkatkan disiplin warga dalam menerapkan protokol kesehatan juga harus diimbangi dengan sarana pendukung. Terutama membiasakan cuci tangan dengan sabun di tempat publik. “Tempat-tempat publik harus tersedia tempat cuci tangan berikut sabun dan tisunya. Selain jumlah wastafel yang perlu diperbanyak, kondisinya pun harus rutin dipantau. Jangan sampai air, sabun atau tisu habis namun tidak segera diperbarui,” jelasnya. **(Dhi)-f**

**"MULIA"**
AUTHORIZED MONEY CHANGER
www.muliamoneychanger.co.id

PERUBAHAN JAM OPERASIONAL MASA PANDEMI COVID - 19
➤ GRAND INNA MALIOBORO HOTEL JL.MALIOBORO 60 YOGYAKARTA
TELP : 0274 - 547 688 DAN 563314
BUKA : 08.00 - 17.00 WIB

PLAZA AMBARRUKMO LOWER GROUND
TELP : 4331272
BUKA : 11.00 - 17.00 WIB
BUNKA SETIAP HARI :
SENIN S/D MINGGU

➤ JL. MARGO UTOMO NO. 53, (MANGKUBUMI) YOGYAKARTA
TELP : 0274 - 5015000
BUKA : 08.00 - 16.00 WIB

TANGGAL 23/SEP/2020

CURRENCY	BELI/		JUAL
	BN	TC	
USD	14,750	-	15,000
EURO	17,250	-	17,550
AUD	10,550	-	10,800
GBP	18,750	-	19,250
CHF	15,950	-	16,250
SGD	10,775	-	11,075
JPY	139,50	-	144,50
MYR	3,475	-	3,675
SAR	3,750	-	4,100
YUAN	2,100	-	2,250

Catatan : Kurs sewaktu - waktu dapat berubah
Menerima hampir semua mata uang asing